

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam penerapan basis kas dan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Malang, bukan untuk menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel secara statistik. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena penerapan akuntansi pemerintahan secara kontekstual melalui analisis isi dokumen laporan keuangan (LKPD) yang disusun oleh pemerintah daerah.

Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata suatu objek berdasarkan fakta yang ada, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap proses dan makna di balik data yang diperoleh. Dalam konteks ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel, melainkan menganalisis dokumen laporan keuangan secara sistematis guna mengidentifikasi bagian-bagian laporan yang masih menggunakan basis kas dan bagian yang sudah menerapkan basis akrual.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih dimungkinkan terdapat bagian laporan yang menggunakan basis kas, terutama pada Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada penerapan kedua basis tersebut (kas dan akrual) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyajian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Lokasi penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Malang, yang beralamat di Jl. Simpang Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. BKAD dipilih karena merupakan instansi yang memiliki peran utama dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Periode penelitian ini mencakup tahun anggaran 2024 sebagai data yang dianalisis. Sedangkan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen resmi yang telah disusun oleh instansi terkait. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan dan menafsirkan isi dari dokumen laporan keuangan untuk mengetahui penerapan basis kas dan basis akrual pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Malang Tahun 2023. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan metode sistematis untuk menafsirkan makna dari data berbentuk teks atau dokumen melalui proses klasifikasi, pengodean, dan penarikan kesimpulan yang logis. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi dilakukan dengan tiga tahapan utama.

Pertama, mengidentifikasi elemen basis kas dan basis akrual dalam laporan keuangan, khususnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Tahap ini bertujuan untuk memetakan bagian-bagian laporan yang masih menggunakan basis kas, seperti pengakuan pendapatan dan belanja saat kas diterima atau dibayarkan, serta bagian yang telah menunjukkan penerapan basis akrual, seperti pengakuan pendapatan, beban, atau kewajiban yang belum direalisasikan secara kas.

Kedua, hasil identifikasi tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian antara praktik penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Malang dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual yang telah ditetapkan secara nasional.

Ketiga, setelah proses perbandingan dilakukan, peneliti menarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Malang. Tahap ini melibatkan interpretasi terhadap hasil analisis dokumen, sehingga dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Kota Malang telah menerapkan basis akrual secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangannya, serta bagian mana yang masih menunjukkan penerapan basis kas.